

Human Resource Development and Winning Strategy for Political Parties in the 2024 Election to Support the 16th Sustainable Development Goals

[Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Strategi Pemenangan Partai Politik dalam Pemilu 2024 untuk Mendukung Sustainable Development Goals ke-16]

Rakhmat Khozi¹⁾, Sigit Hermawan^{*2)}

¹⁾Program Studi Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

^{*}Email Penulis Korespondensi: sigithermawan@umsida.ac.id

Abstract. *This document describes guidelines for Authors in writing an article in UMSIDA. This abstract section should be typed in Italic 10 pt font and number of words of 100-150. If the article is written in Indonesian, the abstract should be typed in English and Indonesian. Meanwhile, if the article is written in English, the abstract should be typed in English only. The abstract should be typed as concisely as possible and should be composed of: problem statement, method, scientific finding results, a short conclusion, and impact. The abstract should be typed in one paragraph only and two-columns format. All sections in the manuscript should be typed using Times New Roman font. Authors should use this document as their article template.*

Keywords - author guidelines; UMSIDA Preprints Server; article template

Abstrak. *Dokumen ini menjabarkan petunjuk bagi Penulis dalam menyusun artikel di UMSIDA Preprints Server. Bagian abstrak ini harus ditulis dengan huruf miring 10pt dan dengan jumlah kata 100-150. Jika artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Jika artikel ditulis dalam bahasa Inggris, abstrak harus ditulis hanya dalam bahasa Inggris. Abstrak harus ditulis singkat mungkin dan harus tersusun atas rumusan masalah, metodologi, hasil penemuan/pengembangan, simpulan ringkas, dan dampak. Abstrak harus ditulis dalam satu paragraf dengan format 1 kolom. Semua bagian dalam artikel harus ditulis menggunakan huruf Times New Roman. Penulis sebaiknya menggunakan dokumen ini sebagai template artikelnya.*

Kata Kunci - petunjuk penulis; UMSIDA Preprints Server; template artikel

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia merupakan momen strategis dalam memperkuat demokrasi sekaligus mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-16 yang menekankan pada pentingnya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh [1]. Partai politik sebagai pilar utama demokrasi memainkan peran vital tidak hanya dalam memenangkan kontestasi elektoral, tetapi juga dalam memastikan bahwa praktik-praktik politik dan kelembagaan yang dijalankan sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan keberlanjutan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) partai menjadi faktor krusial yang tidak hanya berperan dalam efektivitas kampanye dan strategi pemenangan, tetapi juga dalam mewujudkan tata kelola partai yang beretika dan berorientasi pada pelayanan publik. Tantangan seperti komitmen organisasi yang rendah, elitisme, serta implementasi kebijakan yang lemah dalam proses rekrutmen dan pengelolaan kader menjadi hambatan serius terhadap pengembangan SDM partai [2].

Fenomena menarik terjadi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Kabupaten Sidoarjo, di mana Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menunjukkan peningkatan suara yang signifikan, dari 7 kursi pada 2019 menjadi 9 kursi di DPRD Kabupaten Sidoarjo [4]. Hal ini menunjukkan peningkatan posisi politik Partai Gerindra di parlemen Kabupaten Sidoarjo yang semakin kuat dan berpengaruh dalam andilnya menentukan kebijakan dan arah politik pemerintah daerah, dengan bertambahnya anggota wakil rakyat yang dimiliki akan semakin bertambah jumlah anggota untuk menduduki posisi di alat kelengkapan DPRD [5].

Selain itu, Partai Gerindra juga secara konsisten melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program pelatihan kepemimpinan, sekolah kader, serta peningkatan kapasitas politik bagi anggota dan simpatisan. Program-program ini bertujuan untuk mencetak kader yang tidak hanya memiliki loyalitas tinggi, tetapi juga kompetensi dalam menyusun strategi politik dan memahami dinamika kebijakan publik. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menunjang strategi kemenangan pada Pemilu 2024, di mana kader-kader yang telah dibekali dengan wawasan dan keterampilan politik mampu berperan aktif dalam kampanye yang terstruktur serta membangun komunikasi yang kuat dengan masyarakat [5]. Program ini tidak hanya meningkatkan loyalitas, tetapi juga mencetak kader dengan kemampuan komunikasi politik, pemetaan isu, dan strategi elektoral yang adaptif. Peningkatan kualitas kader ini menjadi bagian penting dalam membangun institusi partai yang berkelanjutan dan kredibel.

Dinamika Pilkada di Sidoarjo juga menambah dimensi penting untuk refrensi bidang Pengembangan SDM dan diskursus politik lokal. Pada Pilkada 2024 Kabupaten Sidoarjo, terdapat kecenderungan pergeseran perilaku pemilih dari sekadar loyalitas partai menuju penilaian terhadap kapabilitas dan integritas calon kepala daerah. Ini terbukti dengan kalahnya Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo Amir Aslichin – Edy Widodo dari Partai terbesar PKB dan PDI-P, yang juga putra mantan Bupati incumbent ditumbangkan oleh Pasangan H. Subandi – Mimik Indayana yang diusung oleh koalisi Partai Gerindra – Partai Demokrat – Partai Golkar. Fenomena ini muncul di tengah tantangan seperti politik uang dan lemahnya pengawasan daftar pemilih tetap (DPT), yang menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara dan partai politik dalam menciptakan pemilu yang bersih dan demokratis (Bawaslu Sidoarjo, 2024). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo tahun 2024 menunjukkan dinamika politik yang tidak hanya berfokus pada kontestasi kekuasaan, tetapi juga memiliki implikasi signifikan terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia di tingkat lokal. Partai pemenang dalam perebutan kursi legislative di DPRD, ternyata tidak otomatis paralel dalam memperebutkan perolehan kemenangan jatah kursi eksekutif. Pergeseran dukungan politik dari berbagai partai, seperti keberanian perpindahan yang dilakukan oleh Calon Bupati terpilih H. Subandi, SH., M.Kn. dari jabatan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa pindah ke Koalisi Partai Gerindra, Golkar, dan Demokrat, mencerminkan adanya wujud gerakan strategi adaptasi dalam pengembangan kapasitas individu dalam dunia politik.

Dimana Penguatan kapasitas kepemimpinan ini sejalan dengan teori Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menekankan pentingnya adaptabilitas dan kompetensi dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal [3]. Isu tentang fenomena dalam Pilkada Sidoarjo yang diwarnai oleh politik uang dan tantangan data pemilih menjadi gambaran konkret pentingnya pengembangan SDM yang berintegritas dan sistematis untuk mendukung proses demokrasi yang sehat. Pilkada Sidoarjo menjadi contoh nyata betapa pentingnya partai mengadopsi pendekatan *common-good* HRM dan *green* HRM dalam pengembangan SDM untuk mendukung pencapaian demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Penerapan strategi dalam konteks politik merujuk pada perencanaan terarah untuk mencapai tujuan tertentu melalui alokasi sumber daya yang efisien dan adaptasi terhadap dinamika lingkungan eksternal. Strategi politik partai dalam Pemilu 2024 dapat dilihat sebagai upaya meraih suara melalui berbagai pendekatan, seperti membangun koalisi, memobilisasi basis pendukung, dan menyelaraskan isu-isu kampanye dengan kebutuhan masyarakat. Strategi ini tidak hanya bertujuan memenangkan pemilu tetapi juga mencerminkan peran partai dalam memajukan agenda pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan konstituen [11]. Sementara itu *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama Tujuan ke-16 yang menekankan pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, memiliki relevansi langsung dengan strategi partai politik [12]. Partai yang mengintegrasikan nilai-nilai SDGs dalam kampanye mereka, seperti inklusivitas, keadilan sosial, dan tata kelola yang transparan, tidak hanya memenuhi aspirasi pemilih tetapi juga mendukung transformasi sosial berkelanjutan. Dalam hal ini, strategi parpol berfungsi sebagai instrumen untuk memobilisasi dukungan politik sekaligus menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas melalui pengarusutamaan nilai-nilai SDGs [13].

Penelitian ini sangat penting terkait antara strategi partai politik dalam Pemilu 2024 dengan implementasi Tujuan ke-16 SDGs. Penelitian akan mengeksplorasi sejauh mana partai-partai politik menyusun agenda strategis yang mencerminkan nilai-nilai SDGs, seperti kesetaraan, inklusivitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, penelitian akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi partai politik dalam menjadikan SDGs sebagai landasan strategis kampanye dan kebijakan mereka, serta mengukur dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia [14]. Penelitian sebelumnya mengenai strategi komunikasi politik DPD PDI-P Sumatera Utara dalam membangun kepercayaan pemilih pada Pemilu Legislatif 2024 mengungkapkan lima bentuk utama strategi komunikasi politik, yaitu retorika dalam konsolidasi eksternal partai, agitasi politik melalui badan-badan partai, propaganda politik melalui media massa dan media sosial, lobi politik berbasis aspirasi dan kebijakan, serta tindakan politik untuk membangun citra partai [6].

Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan strategi komunikasi politik DPD PDI-P Sumatera Utara terletak pada tiga pilar utama, yaitu struktur organisasi partai, kader partai di lembaga legislatif, dan kader partai di lembaga eksekutif. Strategi tersebut didukung oleh optimalisasi konsolidasi internal dan eksternal, serta pemanfaatan media massa dan media sosial untuk memperluas pengaruh dan membangun kepercayaan publik terhadap PDI-P [15]. Penelitian sebelumnya menyoroti peran strategis partai politik dalam pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan anggota dan rakyat melalui mekanisme pemerintahan yang demokratis. Pemilu yang diselenggarakan secara demokratis dan berintegritas mendorong partai politik untuk menerapkan berbagai strategi dalam menetapkan calon peserta pemilu [11].

Selain itu, penelitian ini mengkritisi kecenderungan partai politik yang lebih mengutamakan kepentingan partai dibandingkan aspirasi dan kepentingan rakyat [8]. Penelitian sebelumnya membahas strategi komunikasi politik dalam pemilihan umum di era digital, yang menunjukkan perubahan signifikan dalam lanskap komunikasi politik akibat perkembangan teknologi. Media sosial dan *platform online* menjadi alat utama bagi kandidat dan partai politik untuk berinteraksi dengan pemilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi digital memiliki dampak signifikan terhadap persepsi dan keputusan pemilih, menjadikan era digital sebagai momentum penting dalam membentuk perilaku pemilih melalui pendekatan inovatif dan multidimensional [16]. Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah menganalisis strategi komunikasi politik dalam pemilihan umum, baik dalam konteks partai politik maupun pemanfaatan media digital, masih terdapat kesenjangan dalam menghubungkan strategi tersebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs ke-16 yang berfokus pada perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Penelitian pertama lebih fokus pada strategi komunikasi politik yang digunakan oleh partai politik, namun tidak mengaitkannya dengan pencapaian SDGs atau dampaknya terhadap perilaku pemilih dalam konteks pembangunan berkelanjutan [17].

Pada Penelitian sebelumnya ditemukan banyak membahas pemilihan calon dan verifikasi partai politik dalam Pemilu, tetapi kurang mengidentifikasi bagaimana kebijakan partai politik dapat mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam hal keadilan dan institusi yang kuat. Penelitian ketiga menyoroti penggunaan media digital dalam strategi komunikasi politik, namun tidak mengaitkan dampak jangka panjang dari strategi tersebut terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana pengembangan Sumber Daya Manusia dan strategi pemenangan partai politik Gerindra Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu 2024 dapat mendukung SDGs ke-16, terutama dalam membangun institusi yang lebih kuat, adil, dan berkeadilan sosial, serta memastikan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses demokrasi [18].

Penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai pengembangan SDM dan strategi pemenangan pemilu yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Fungsi pengembangan SDM sangat erat kaitannya dengan peran partai politik dalam kaderisasi anggota dan pengurus, terutama untuk kader partai yang menduduki jabatan publik, baik eksekutif maupun legislatif. Figur kader yang memiliki SDM tinggi akan menjadi aset dan investasi partai politik dalam menjaring simpatisan dan pemilih di setiap gelaran pemilu. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi partai politik dalam menyusun strategi kampanye yang tidak hanya efektif dalam meraih suara tetapi juga berkontribusi pada sasaran tujuan pembangunan nasional, khususnya implementasi SDGs ke-16 tentang perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk membantu pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam memahami pentingnya integrasi nilai-nilai SDGs ke dalam proses politik, sehingga menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

II. LITERATURE REVIEW

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Partai

Menurut Gary Dessler [22], pengembangan SDM mencakup kegiatan pelatihan, peningkatan keterampilan, dan pengembangan kepemimpinan, yang kesemuanya diarahkan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen strategis dalam memperkuat kapasitas institusi politik. Pengembangan SDM mencakup proses rekrutmen kader, pelatihan, pengembangan kompetensi, hingga sistem promosi yang meritokratis. Penekanan pada manusia sebagai faktor strategis yang penting bagi kesuksesan organisasi telah berkontribusi pada interaksi dan konvergensi isu-isu strategi dan SDM [23]. *Resource-Based View* (RBV) menekankan bahwa keunggulan bersaing berkelanjutan suatu organisasi terutama ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya internal yang strategis. Menurut [23], sumber daya dapat berupa aset berwujud maupun tidak berwujud, seperti kompetensi kader, pengalaman organisasi, jaringan sosial, hingga struktur kelembagaan partai. Pengembangan sumber daya manusia dapat dijelaskan melalui *Human Capital Theory* yang menekankan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi kader merupakan aset penting yang perlu diinvestasikan melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, serta penguatan kapasitas organisasi. *Intellectual Capital* (IC) terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu *human capital*, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas individu; *structural capital*, yang mencakup sistem, proses, budaya, dan mekanisme organisasi yang mendukung inovasi; serta *relational capital*, yang merujuk pada hubungan organisasi dengan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan komunitas. Kombinasi ketiga komponen ini membentuk fondasi berbasis pengetahuan yang mampu meningkatkan inovasi, efektivitas operasional, serta kinerja jangka panjang organisasi [24]. Dengan demikian, IC tidak hanya memperkuat daya saing, tetapi juga mendorong keberlanjutan organisasi dalam menghadapi dinamika persaingan global. Partai politik yang mampu mengelola modal manusia sekaligus mengoptimalkan sumber daya strategis internal akan memiliki legitimasi yang kuat dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang efektif.

2. Kepercayaan Publik & Menghadapi Tantangan Politik

Kepercayaan publik berkelindan dengan kinerja dan tata kelola; ia relatif stabil namun peka pada perubahan konteks politik dan kinerja institusi. Penguatan kelembagaan partai (aturan, kepemimpinan, sanksi/insentif, kanal partisipasi) membantu meredam faksionalisasi dan menjaga legitimasi di tengah krisis/misinformasi. Penelitian terdahulu menunjukkan kepercayaan cenderung stabil jangka menengah – panjang namun responsif terhadap perubahan lingkungan politik dan kebijakan, sementara kualitas performa pemerintahan meningkatkan kepatuhan dan legitimasi kebijakan. Pada level organisasi partai, indikator institusionalisasi dan kekuatan partai berkorelasi dengan ketahanan menghadapi guncangan elektoral [19], [20].

3. Strategi Pemenangan di Era Digital

Kampanye digital meningkatkan jangkauan, segmentasi, dan koordinasi pesan; namun efektivitas mikro-penargetan bersyarat pada konteks, desain pesan, dan transparansi platform. Regulasi dan tata kelola platform (iklan politik, disinformasi, *deepfakes*) menjadi variabel penentu hasil elektoral dan kepercayaan publik. Skala dan pola belanja yang menuntut kapabilitas analitik partai; studi eksperimental menunjukkan iklan bertarget bisa unggul dibanding taktik lain, meski "*microtargeting*" multi-atribut tidak selalu mengalahkan penargetan sederhana [21].

4. Integrasi SDGs ke-16 dalam Strategi Politik

SDGs16 (perdamaian, keadilan, institusi kuat) berfungsi sebagai kerangka normatif untuk memperkuat legitimasi politik, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi tata kelola. Bukti ilmiah global menunjukkan dampak politik SDGs nyata namun banyak bersifat diskursif; integrasi yang lebih mendalam menuntut perubahan aturan, alokasi sumber daya, dan mekanisme akuntabilitas lintas level (nasional-lokal-partai) [25]. Dalam konteks ini, pengembangan SDM dan strategi pemenangan partai politik perlu diarahkan untuk memperkuat praktik demokrasi yang bersih, bebas korupsi, serta menghormati hak asasi manusia. Dalam kerangka *Sustainable HRM*, muncul dua pendekatan penting yaitu *Common-Good HRM* dan *Green HRM*. *Common-Good HRM* menekankan bahwa praktik manajemen sumber daya manusia tidak semata-mata diarahkan untuk kepentingan organisasi internal, melainkan juga untuk kontribusi terhadap nilai kolektif seperti etika, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Model ini mengintegrasikan *authenticity* dalam pelaporan dan praktik HRM, sehingga memperkuat legitimasi organisasi di mata masyarakat melalui kebijakan rekrutmen yang inklusif, pelatihan berbasis etika, serta budaya organisasi yang berorientasi pada keberlanjutan [24].

III. METODE

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif studi kasus pada partai politik Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai pengembangan sumber daya manusia dan strategi pemenangan partai politik dalam Pemilu 2024 serta keterkaitannya dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDGs ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber (*key informant*) yang memiliki relevansi dengan strategi pemenangan partai politik dan pengembangan sumber daya manusia. Observasi langsung dilakukan pada kegiatan partai politik terkait pengembangan sumber daya manusia dan strategi pemenangan dalam Pemilu 2024.

Tabel 1. Daftar Narasumber Penelitian

No	Informan	Jabatan	Instansi
1	Bambang Pujiyanto	Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo / Ketua Komisi B DPRD Kab. Sidoarjo	Partai Gerindra
2	Kayan	Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo / Wakil Ketua DPRD Kab. Sidoarjo	Partai Gerindra
3	Achmad Muzayin Syafrial	Sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo / Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kab. Sidoarjo	Partai Gerindra
4	Nyong Etis	Akademisi	UIN Sunan Ampel Surabaya

2. Data Sekunder

Literatur berupa jurnal, artikel ilmiah, dan buku yang relevan dengan strategi pemenangan partai politik dan pengembangan sumber daya manusia. Dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia yang telah dilakukan oleh Partai Gerindra, seperti hasil kongres partai, laporan kegiatan kaderisasi, dan modul pelatihan kader.

Teknik Pengumpulan Data

- Observasi Langsung** Observasi dilakukan terhadap kegiatan partai politik dalam upaya kaderisasi, pelatihan, dan strategi kampanye yang mendukung pencapaian SDGs ke-16. Observasi dilakukan di kantor DPC partai politik Gerindra Kabupaten Sidoarjo, Jl. Lingkar Barat No. 09, Wismasarinadi, Magersari, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, serta dalam berbagai forum diskusi dan kegiatan sosialisasi politik.
- Studi Dokumen** Studi terhadap dokumen resmi yang dikeluarkan oleh partai politik terkait program kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini adalah "Laporan Kaderisasi dan Pendidikan Politik Partai Gerindra 2023" yang mencakup strategi penguatan kapasitas kader partai.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman (1984) [26], yang terdiri dari empat tahapan:

- Data Collection (Pengumpulan Data)**
Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen yang telah dikumpulkan.
- Data Reduction (Reduksi Data)**
Data yang telah dikumpulkan diseleksi, disederhanakan, dan dikategorikan berdasarkan tema utama, yaitu strategi pemenangan, pengembangan sumber daya manusia, dan keterkaitan dengan SDGs ke-16.
- Data Display (Penyajian Data)**
Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan skema yang memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian.
- Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)**
Setelah data dianalisis dan dibandingkan dengan teori serta studi sebelumnya, kesimpulan penelitian ditarik untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Partai

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam konsolidasi partai politik pasca-reformasi. Kualitas kader yang kompeten, berintegritas, dan berwawasan luas menjadi penentu utama dalam merumuskan kebijakan, memperkuat struktur kelembagaan, serta merespons aspirasi masyarakat. Dalam era demokrasi yang semakin kompleks, penguatan kapasitas kader merupakan fondasi bagi efektivitas partai politik, baik dalam fungsi representasi maupun dalam menjaga keberlanjutan organisasi. Hambatan serius terhadap institusionalisasi partai sering muncul ketika terjadi kelemahan komunikasi dua arah antara elit partai dan basis massa. Kondisi ini menyiratkan bahwa tanpa pengembangan SDM yang sistematis, partai politik berisiko kehilangan legitimasi sekaligus keterhubungan dengan masyarakat akar rumput [32]. Pengembangan SDM menjadi faktor strategis yang menentukan kapasitas organisasi untuk memenangkan kompetisi elektoral dan mempertahankan legitimasi publik. Partai politik yang berinvestasi pada pengembangan kader secara sistematis akan memiliki daya saing politik yang lebih tinggi karena mampu membangun kompetensi, integritas, dan militansi kader yang sejalan dengan tuntutan zaman.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) sangat penting dalam konteks pengelolaan partai politik pasca-reformasi. SDM yang berkualitas akan menentukan kualitas partai, termasuk kemampuannya dalam merumuskan kebijakan, menjalankan roda organisasi, dan merespons aspirasi masyarakat. Partai politik yang kuat membutuhkan kader-kader yang tidak hanya militan, tetapi juga memiliki kompetensi, integritas, dan wawasan luas. (Bambang Pujiyanto).

Parpol saat ini berlomba – lomba membuat program diklat sekolah politik atau istilah lain guna pengembangan SDM kadernya, bagi partai gerindra semua pengurus dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah harus mengikuti penggeblengan di hambalang. Kader – kader parpol yang duduk di lembaga pemerintahan merupakan etalase partai, dimana SDM mereka menjadi taruhan eksistensi partai. Maka untuk itu pentingnya partai politik harus terus melakukan pengembangan SDM kader, agar tetap tercetak kader partai militan yang bisa mengikuti tuntutan perkembangan zaman dan mendapat simpati pemilih. (Kayan)

DPC Partai Gerindra Sidoarjo secara konsisten menekankan pentingnya pengembangan SDM melalui pendidikan politik, pelatihan kader, dan kaderisasi yang sistematis demi memperkuat kelangsungan organisasi. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan kader militan yang loyal, responsif terhadap tantangan politik lokal, dan siap menghadapi kompetisi elektoral. Upaya ini terbukti vital dalam membentuk kader militan yang responsif terhadap dinamika politik lokal dan menjadikan mereka sebagai etalase partai di masyarakat. Tanpa praktek kaderisasi yang kuat, partai akan kesulitan menumbuhkan keterikatan dengan masyarakat di tingkat akar rumput dan menjaga kontinuitas komunikasi politik [32].

Pengembangan SDM di Partai Gerindra Sidoarjo telah diaktualisasikan dalam bentuk program kaderisasi yang sistematis, meliputi pendidikan politik, pelatihan kader, dan pelibatan kader dari pusat hingga daerah. Program ini dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas, membangun loyalitas kader, dan mempersiapkan figur kader unggul dengan kapabilitas intelektual dan militansi tinggi untuk menghadapi pemilu. Sistematis dapat dipahami sebagai strategi berbasis sumber daya sebagaimana dijelaskan dalam *Resource-Based View* (RBV), di mana sekolah kader, kurikulum berjenjang, dan sistem kaderisasi berfungsi sebagai sumber daya internal yang *valuable*, *rare*, *inimitable*, dan *non-substitutable* [33]. Gerindra memiliki infrastruktur kaderisasi yang relatif terlembaga: adanya sekolah/pusat pelatihan kader, kurikulum dan silabus berjenjang (Latihan Kader Dasar–Menengah–Paripurna), serta penekanan pada peningkatan kapasitas politik dan kepemimpinan sebagaimana tertuang dalam AD/ART dan Buku Pedoman Organisasi Partai Gerindra. Temuan ini mengindikasikan proses kaderisasi yang terstandar dan tersentralisasi untuk membangun pipeline kepemimpinan, selaras dengan bukti empiris bahwa partai dengan mekanisme internal yang jelas pelatihan, seleksi, dan standarisasi kompetensi cenderung lebih kohesif dan responsif terhadap dinamika kompetisi elektoral. Dengan demikian, praktik kaderisasi Gerindra yang terstruktur dapat dibaca sebagai bentuk profesionalisasi organisasi partai yang memperkuat institusionalisasi dan tata kelola internal. Selaras dengan *Human Capital Theory* (HCT), investasi pada pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan internalisasi ideologi menunjukkan bahwa partai menempatkan kader sebagai modal manusia yang produktif dan strategis, temuan ini juga dapat dibaca melalui kerangka *Intellectual Capital* (IC), di mana kompetensi kader mencerminkan human capital, sistem kaderisasi yang terlembaga menunjukkan structural capital, serta integrasi nilai lokal dengan masyarakat Sidoarjo membentuk relational capital [24].

Sistem rekrutmen Partai Gerindra bersifat terbuka dan inklusif, sementara program pelatihannya menekankan perpaduan antara nilai keagamaan, kultur masyarakat Sidoarjo, serta kearifan lokal yang agamis dan nasionalis. Hal ini menunjukkan adanya upaya strategis partai untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik masyarakat setempat, sehingga kader lebih mudah diterima dan arah perjuangan politik partai menjadi lebih relevan dengan kebutuhan warga. Kombinasi antara rekrutmen politik yang terbuka, program pelatihan kader yang terstruktur, serta integrasi nilai-nilai lokal merupakan faktor strategis yang tidak hanya memperkuat daya saing elektoral partai, tetapi juga memperdalam proses demokratisasi internal partai politik. Berbagai program khusus yang diarahkan untuk membangun loyalitas, militansi, dan kapasitas kader. Program tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan politik, pembekalan logistik dan arahan dari DPP secara berjenjang, hingga kegiatan ret-ret/berkemah di Hambalang sebagai wadah internalisasi ideologi dan kebersamaan kader. Temuan ini mengindikasikan bahwa Gerindra menempatkan pengembangan kader sebagai strategi kunci untuk memperkuat soliditas partai serta daya saing dalam kontestasi politik, sejalan dengan kajian akademik yang menekankan pentingnya kaderisasi politik sebagai instrumen profesionalisasi dan institusionalisasi partai.

Partai Gerindra memiliki beberapa program pengembangan untuk meningkatkan loyalitas, militansi, dan kapasitas kader dalam menghadapi kontestasi politik. Program-program ini mencakup peningkatan kualitas kader melalui pelatihan dan pendidikan politik, penguatan basis massa melalui pendekatan langsung dan pemanfaatan media sosial, serta strategi pemenangan pemilu yang adaptif dan inovatif. (Bambang Pujiyanto)

Pembekalan kader yang jadi pengurus dan anggota partai Gerindra dilakukan secara intens berkala dalam pelatihan tim sukses sampai struktur tingkatan desa. Materi pelatihan selain penyampaian visi misi dan platform partai, ada materi lain terkait teknik rethorika, dinamika politik, analisa sosial, manajemen organisasi, leadership dan medsos. (Achmad Muzayin Syafrial)

Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, strategi ini dapat dipahami sebagai bentuk *human resource development* yang menekankan pada *training and development*, *competency building*, dan *performance management* guna meningkatkan efektivitas organisasi [22]. Proses kaderisasi yang menekankan komunikasi politik, keterampilan sosial, serta pelatihan kepemimpinan sejalan dengan prinsip MSDM yang memandang peningkatan kualitas individu sebagai aset utama organisasi. Penguatan kapasitas kader melalui pembekalan ideologis dan keterampilan praktis berkontribusi signifikan terhadap efektivitas strategi kampanye dan meningkatkan daya saing elektoral partai politik [22]. Dengan demikian, praktik kaderisasi politik Partai Gerindra dapat dibaca sebagai implementasi teori MSDM dalam konteks organisasi politik, di mana kader diperlakukan sebagai sumber daya strategis untuk mencapai tujuan elektoral partai.

2. Upaya Dalam Mempertahankan Kepercayaan Publik dan Menghadapi Tantangan Politik

Kepercayaan publik terhadap partai politik merupakan fondasi penting dalam menjaga legitimasi dan stabilitas demokrasi, termasuk dalam konteks Pemilu 2024. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik meningkat melalui mekanisme pemilihan langsung selama proses pemilu berlangsung tanpa konflik meskipun peningkatan tersebut tidak begitu signifikan terhadap partai politik sebagai institusi khusus. Konduktivitas dan integritas dalam pelaksanaan pemilu menjadi faktor penentu untuk memperkuat kepercayaan publik secara umum [27]. Dalam konteks Pemilu 2024 di Sidoarjo, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sempat muncul dugaan terjadinya “fujur” politik di kalangan masyarakat akibat kekecewaan terhadap dinamika politik elite pasca Pilpres 2019, hasil riset lapangan menunjukkan bahwa publik masih menaruh cukup kepercayaan pada perlunya instrumentasi demokratis melalui pemilu di mana parpol berkontestasi memperebutkan ceruk elektoral untuk meraih kursi kekuasaan [28]. Partisipasi pemilih yang tinggi di Pemilu 2024 menjadi indikator bahwa harapan terhadap partai politik belum sepenuhnya luntur. Harapan ini umumnya terkait pada janji partai untuk mengawal kebijakan publik, menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, menekan kemiskinan, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan, infrastruktur, dan keamanan.

Kepercayaan publik terhadap partai politik dalam konteks Pemilu 2024, dipengaruhi oleh berbagai faktor dan Secara umum, kepercayaan publik terhadap partai politik cenderung berfluktuasi dan dipengaruhi oleh kinerja partai, integritas penyelenggara pemilu, dan dinamika politik yang terjadi. (Bambang Pujiyanto)

Dalam kontestasi Pemilu 2024 kepercayaan publik terhadap partai politik masih relatif tinggi, ini terbukti dari partisipasi pemilih untuk datang ke TPS memilih calon legislatif dan eksekutif. (Achmad Muzayin Syafrial).

Data ini kemudian terkonfirmasi melalui partisipasi publik dalam pemilu 2024 yang menunjukkan angka relatif tetap tinggi. Meskipun pada pilkada ada tren penurunan yang cukup signifikan, tetapi variabel selain isu *trust* (kepercayaan) kepada parpol masih bisa diajukan sebagai faktor kunci dalam rejim pemilu serentak ini. Artinya, menurut hemat kami, praktik politik yang melibatkan partai politik yang ada selama ini, dengan segala kritik dan rasa frustrasi yang berkembang atas kekurangannya, masih belum memupus harapan dan kepercayaan publik pada proses berdemokrasi yang ada sebagai mekanisme yang masih terlihat paling feasible dan sekaligus reliable bagi sebuah bangsa dengan kebhinekaan yang luar biasa ini dalam mengelola kekuasaan dan kontestasinya secara aman, damai, dan jauh dari kekerasan (Nyong Etis).

Kepercayaan publik terhadap partai politik dalam Pemilu 2024 tetap relatif stabil, dibuktikan dengan partisipasi pemilih yang tinggi di TPS. Meskipun kritikan terhadap kinerja parpol dan dinamika politik hadir, masyarakat masih percaya bahwa pemilu serentak merupakan mekanisme demokrasi paling layak dan andal, terutama dalam konteks keragaman Indonesia, untuk mengelola persaingan politik secara aman dan inklusif. Temuan ini konsisten dengan studi [27], yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap institusi politik meningkat ketika pemilu berlangsung tanpa konflik bahkan jika kepercayaan terhadap partai politik tetap tidak meningkat secara signifikan. Namun partai politik menghadapi tantangan yang cukup kompleks, kecenderungan hubungan yang bersifat temporer dengan masyarakat, yang intensif hanya menjelang pemilu namun meredup setelahnya. Terdapat kesenjangan antara janji politik dan realisasinya. Selain itu, kasus korupsi yang melibatkan elit politik baik di tingkat nasional maupun lokal, termasuk sejarah politik Sidoarjo yang diwarnai oleh masalah hukum beberapa bupati, menjadi penghalang yang signifikan bagi pembentukan citra positif partai di mata publik. Tantangan lain adalah keterbatasan modal logistik untuk menjalankan program yang berdampak langsung di masyarakat, sementara pemilih semakin rasional dan menuntut bukti nyata.

Tantangan utama partai politik dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pemilih di Kabupaten Sidoarjo, seperti halnya daerah lain, adalah mengatasi disparitas antara janji politik saat kampanye dan realisasi ketika sudah terpilih, meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dan akuntabilitas penggunaan jabatan, serta memperkuat ideologi anggota partai dan rekrutmen kader simpatisan. Selain itu, isu budaya politik yang ditandai dengan ketidakpercayaan terhadap elit politik dan kasus korupsi juga menjadi penghalang. (Bambang Pujiyanto).

Parpol perlu bertumbuh kearah yang selaras dengan aspirasi publik. Karena dukungan elektoral dari publik kedepan tampaknya akan semakin menuntut hadirnya figur-figur politisi yang berintegritas dan menunjukkan kepedulian nyata dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Parpol juga tidak bisa asal comot orang untuk menjadi kadernya tanpa mempertimbangkan aspek ini dan tanpa memberikan bekal pendidikan politik yang memadai. Mengingat bahwa persepsi negatif publik terhadap politisi juga akan berimbas negatif kepada parpol yang menjadi rumahnya, demikian pula sebaliknya. (Nyong Etis).

Analisis temuan ini menunjukkan bahwa di tingkat grassroot, loyalitas pemilih tidak hanya ditentukan oleh identitas politik atau kedekatan ideologis, tetapi juga oleh kemampuan partai untuk menyediakan manfaat nyata dan berkesinambungan. Strategi partai politik dalam menjaga kepercayaan publik harus mengombinasikan pendekatan *top-down* yang mengedepankan kebijakan publik responsif, dengan pendekatan *bottom-up* yang menekankan keterlibatan langsung melalui program-program nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

3. Strategi Pemenangan di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan pada strategi kampanye politik. Strategi pemenangan di era digital saat ini menuntut partai politik dan kandidat untuk mengintegrasikan media sosial, big data, dan teknologi AI dalam komunikasi kampanye secara adaptif dan responsif. Media digital tidak hanya menjadi saluran komunikasi, tetapi juga arena pertarungan narasi dan pembentukan citra politik yang memengaruhi preferensi pemilih, khususnya generasi muda. Pentingnya microtargeting berbasis geolokasi dan demografi meski efektivitasnya kadang dianggap lebih dangkal dari ekspektasi awal [31]. Kesuksesan kampanye di era digital kini tergantung pada sinergi antara konten kreatif, pendekatan *data-driven*, dan kemampuan merespons secara *real-time* terhadap dinamika publik dan platform digital. Kampanye politik tidak lagi mengandalkan satu jalur, melainkan memadukan strategi tatap muka dengan optimalisasi media digital.

Jurkam tidak lagi harus diartikan sebagai perseorangan yang bergerak secara individual, tetapi bisa merupakan kelompok atau lembaga, termasuk media, yang secara terorganisir bekerja untuk pemenangan parpol tertentu. Para influencer yang memiliki ceruk pengaruh signifikan di masyarakat, terutama melalui ruang virtual atau digital, dengan distingsi citra dan ketokohnya masing-masing, bisa menjadi jurkam yang tetap dibutuhkan dalam kontestasi politik di tanah air. Suka atau tidak suka, publik saat ini sudah menjadikan

dunia maya, melalui gawai atau perangkat teknologi informasi yang mereka miliki, sebagai sumber informasi yang akan mempengaruhi cara pandang serta preferensi mereka tentang politik. (Nyong Etis).

Juru Kampanye partai politik di era digital masih sangat dibutuhkan, selain dari kewajiban permintaan oleh penyelenggara pemilu KPU saat akan digelar rapat umum yang membutuhkan Jurkam. Kondisi masyarakat kita tidak semua bisa memakai gadget atau teknologi digital, mungkin lebih pada segmen anak muda dan golongan berpendidikan saja. Jadi peran juru kampanye masih sangat efektif untuk menjadi tukang sihir pemilih, terutama pemilih yang gagap teknologi dan pemula yang belum pernah ikut pemilu. (Achmad Muzayin Syafrial).

Kampanye digital semakin dominan untuk menjangkau pemilih muda, berpendidikan, dan melek teknologi, kampanye tatap muka yang melibatkan juru kampanye (Jurkam) tetap memiliki peran penting dalam memenangkan dukungan, terutama di kalangan generasi *baby boomers*, masyarakat desa, dan mereka yang gagap teknologi. Jurkam berfungsi bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai figur yang mampu membangun kedekatan emosional, memobilisasi massa, serta meningkatkan kepercayaan terhadap partai politik dan kandidat.

Media sosial telah menjadi instrumen vital dalam strategi kemenangan modern, terutama untuk menjangkau pemilih muda, Generasi Z dan Milenia melalui platform seperti *Facebook*, *Instagram*, *TikTok*, dan *YouTube* dengan konten yang kreatif, singkat, dan relevan. Selain lebih murah, pendekatan ini juga terbukti efektif dalam menjangkau audiens massa dalam waktu singkat. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa influencer memiliki peran kunci dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas; sebanyak 39% dampak mereka dalam kampanye digital berasal dari kedekatan emosional dan hubungan personal dengan audiens mereka *Net Influencer*. Secara global, makin banyak politisi yang mengandalkan media sosial untuk menciptakan "ruang dialog digital" yang dinamis, memungkinkan keterlibatan dan mobilisasi pemilih muda secara interaktif [30].

Media sosial yang menjadi instrumen distribusi, diseminasi, dan amplifikasi informasi sekaligus juga menjadi ruang perbincangan publik tentang beragam isu, termasuk politik, memiliki peran vital dan niscaya bagi parpol dalam mengembangkan strategi kampanyenya. Terlebih bagi pada pemilih muda yang memang lahir dan tumbuh dalam dunia yang terhubung dan bekerja dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semacam itu sejak sangat dini. (Nyong Etis).

Media sosial memainkan peran sentral dalam kampanye partai politik saat ini, terutama dalam menjangkau pemilih muda, strategi yang efektif untuk menarik simpati pemilih muda meliputi konten yang kreatif dan relevan, interaksi langsung melalui live dan polling, serta memanfaatkan influencer yang memiliki basis penggemar di kalangan anak muda. (Bambang Pujiyanto).

Sesungguhnya strategi kampanye melalui media sosial sangat hemat dan sesuai dengan era digital saat ini. Mengingat jumlah pemilih pemula yang belum punya pilihan bisa dengan mudah terjangkau sebagai sasaran parpol, visualisasi program dan bukti kerja parpol bisa disampaikan lebih detail. (Kayan).

Partai Gerindra Partai Gerindra telah merancang strategi kemenangan yang terstruktur dan berkelanjutan meliputi pendekatan door-to-door, pemanfaatan media sosial, program sosial-komunitas, serta pendidikan politik yang diformalkan melalui Bapil dan Badan Litbang berdasarkan kesepakatan rapat kerja. Temuan ini mencerminkan pendekatan partai yang adaptif dan multifaset dalam menjalin koneksi dengan publik. Efektivitas kampanye politik kontemporer banyak bergantung pada sinergi antara strategi digital dan mobilisasi offline demi memperkuat legitimasi politik dan meraih dukungan massa [33]. Partai Gerindra melalui DPC Sidoarjo telah menerapkan strategi politik yang beragam dan adaptif dalam menghadapi kontestasi Pilkada serta Pemilu 2024. Strategi tersebut mencakup penguatan peran kader melalui konsolidasi internal, pendidikan politik kepada masyarakat, pemanfaatan media sosial, serta pelaksanaan kegiatan sosial dan komunitas.

DPC Partai Gerindra Sidoarjo menerapkan berbagai strategi dan inisiatif dalam menghadapi kompetisi politik di Pilkada dan Pemilu 2024 yang lalu. Beberapa di antaranya adalah konsolidasi partai untuk mengoptimalkan peran kader, pendidikan politik bagi masyarakat, pemanfaatan media sosial, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. (Bambang Pujiyanto).

Strategi yang dilakukan DPC Gerindra Sidoarjo dalam Pilkada dan Pemilu 2024 adalah dengan menyiapkan kader-kader terbaik yang siap bertarung dalam kontestasi. Alhamdulillah, Pilkada Sidoarjo Kader Gerindra Menang dan di Legislatif menjadi 2 besar perolehan kursi DPRD Sidoarjo. (Achmad Muzayin Syafrial)

Keberhasilan strategi ini terlihat dari capaian Partai Gerindra di Sidoarjo pada Pemilu 2024, di mana partai ini menjadi peraih kursi terbesar kedua di DPRD Kabupaten dan memenangkan Pilkada dengan kader internal. Temuan ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan kemenangan di era digital membutuhkan sinergi antara strategi komunikasi tradisional dan digital, serta dukungan infrastruktur organisasi yang solid.

4. Integrasi SDGs ke-16 dalam Strategi Politik

Integrasi prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*), dalam strategi politik menjadi penting karena mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang meliputi tata kelola yang inklusif, akuntabel, dan transparan, sehingga meningkatkan legitimasi politik dan kepercayaan publik. Upaya ini tercermin melalui kebijakan partisipatif, penguatan lembaga politik, serta mekanisme pengawasan yang menekan fragmentasi kebijakan antar-sektor. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan SDG 16 mampu memperkuat daya saing politik dengan membangun ketahanan kelembagaan dan inovasi kebijakan, meskipun implementasinya sering terkendala koordinasi antar-lembaga [25]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak semua struktur partai secara formal mencantumkan SDGs sebagai kerangka kerja, banyak program dan kebijakan partai yang selaras dengan prinsip SDGs ke-16. Partai Gerindra, misalnya, mengedepankan prinsip satu komando untuk menghindari faksionalisme internal, menerapkan proses seleksi kepemimpinan tanpa kompetisi destruktif antar kader, dan menjalankan berbagai program sosial yang berorientasi pada keadilan dan inklusi.

Partai Gerindra wajib memahami dan mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, dalam merancang strategi kelembagaan dan kampanye. Tujuan ini menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa kebijakan serta program yang diusung partai sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, inklusi, dan tata kelola yang baik. (Bambang Pujiyanto).

Partai Gerindra sangat mendukung setiap program pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan bangsa, meski SDGs tidak secara langsung menjadi bagian dari program partai politik. Namun langkah-langkah kerja partai Gerindra dilapangkan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. (Kayan)

SDGs selama ini hanya dikenal di program pemerintahan, terutama di desa. Partai politik secara spesifik memang tidak memiliki program SDGs, namun secara tidak langsung 18 Program SDGs sudah ada dalam kegiatan partai Gerindra. Terutama dalam pembangunan kelembagaan yang kuat dan keadilan, sebagai contoh dalam proses pemilihan ketua partai di setiap jenjang tingkatan mulai dari Pusat, Daerah sampai paling bawah di Desa, Partai Gerindra tidak menggunakan sistem kompetisi pertarungan antar kader sendiri. Melainkan berdasarkan rekomendasi dari struktur di atasnya, sehingga potensi munculnya faksi dan perpecahan bisa di minimalisir (Achmad Muzayin Syafrial).

Temuan ini sejalan dengan kajian [25] yang menegaskan bahwa SDGs, khususnya tujuan terkait kelembagaan, mampu menjadi instrumen transformatif dalam memperkuat legitimasi politik dan inovasi tata kelola partai. Internalisasi nilai-nilai SDG 16 pada Partai Gerindra di Sidoarjo tidak hanya tercermin pada retorika politik, tetapi juga pada praktik kelembagaan yang mengutamakan stabilitas, keadilan, dan pencegahan fragmentasi politik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa partai politik dapat mengadaptasi agenda pembangunan global ke dalam dinamika lokal melalui mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif dan berjenjang, sehingga memperkuat kepercayaan publik sekaligus memperluas basis dukungan elektoral. Dengan demikian, SDGs berfungsi sebagai *soft governance framework* yang mampu mendorong partai untuk tidak hanya mengejar kemenangan elektoral, tetapi juga membangun tata kelola politik yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam upaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16 yang menekankan pada perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang kuat dan inklusif, Partai Gerindra di Kabupaten Sidoarjo menjalankan berbagai strategi dan program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini tercermin dari pandangan para informan penelitian yang memberikan gambaran mengenai arah strategis partai, implementasi program, hingga bentuk kontribusi sosial yang dilakukan.

Partai Gerindra untuk mendukung SDGs ke-16 dapat menjalankan berbagai program yang berfokus pada kebijakan inklusif, pembangunan infrastruktur esensial, dan ekonomi berkelanjutan, seperti peningkatan akses kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. (Bambang Pujiyanto).

Program Partai Gerindra Sidoarjo yang bisa dirasakan masyarakat berupa mobil siaga gratis, operasi pasar murah, mobil pintar keliling, bantuan hukum gratis, beasiswa pendidikan, pembinaan UMKM, hingga pemberdayaan perempuan dan pemuda. (Kayan)

Program yang telah dilakukan Partai Gerindra meliputi penjangkaran aspirasi pembangunan infrastruktur, mobil ambulans gratis, pembagian sembako, beasiswa, pendampingan hukum, pembinaan UMKM, dan kegiatan sosial-keagamaan. (Achmad Muzayin Syafrial)

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi Partai Gerindra dalam mendukung SDGs ke-16 di Sidoarjo tidak hanya bersifat normatif, tetapi diwujudkan dalam bentuk program konkret yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Upaya ini mencerminkan adanya integrasi nilai inklusivitas, penguatan kelembagaan, serta keadilan sosial melalui pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, hingga advokasi hukum. Hal ini sejalan dengan temuan [25] yang menyatakan bahwa SDGs terutama Tujuan ke-16 dapat difungsikan sebagai kerangka transformatif yang memperkuat legitimasi politik dan mendorong inovasi dalam tata kelola kelembagaan. Praktik Partai Gerindra yang menekankan prinsip satu komando untuk menghindari faksionalisme, seleksi kepemimpinan tanpa kompetisi destruktif, serta program sosial yang berorientasi pada keadilan dan inklusi, merupakan manifestasi dari Common-Good HRM, karena mengintegrasikan nilai etika, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan pada kepentingan kolektif dalam pengelolaan kader dan kelembagaan partai. Di sisi lain, keberpihakan partai pada program pemberdayaan masyarakat, advokasi hukum, serta inisiatif berbasis pelayanan publik dapat dibaca dalam kerangka Green HRM, yang mengaitkan praktik manajemen sumber daya dengan prinsip keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, strategi Gerindra dalam mendukung SDGs ke-16 di Sidoarjo tidak hanya berfungsi untuk memperkuat tata kelola politik yang inklusif dan akuntabel, tetapi juga merefleksikan integrasi sustainable HRM yang menggabungkan dimensi common good dan keberlanjutan lingkungan sebagai landasan transformasi kelembagaan [2].

Implikasi Manajerial

Penelitian ini memberikan sejumlah implikasi manajerial yang dapat menjadi acuan bagi pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Pertama, partai perlu memperkuat kepercayaan publik secara berkelanjutan melalui sistem komunikasi dua arah yang konsisten, tidak hanya pada masa kampanye tetapi juga di periode antar pemilu. Strategi ini penting untuk meminimalkan persepsi negatif publik sekaligus membangun legitimasi politik jangka panjang. Kedua, optimalisasi strategi *hybrid campaign* menjadi kebutuhan mendesak, yaitu mengintegrasikan kampanye digital dan tatap muka secara proporsional sesuai dengan segmen pemilih. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menjangkau pemilih muda yang memiliki literasi digital tinggi, sementara kampanye tatap muka lebih efektif untuk pemilih dengan keterbatasan akses teknologi. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia (SDM) partai harus dilakukan secara berkelanjutan melalui program kaderisasi, sekolah politik, dan pelatihan berbasis kompetensi yang relevan dengan tuntutan era digital. Keempat, prinsip SDGs ke-16 terkait perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan internal partai serta diterjemahkan dalam program sosial-politik di tingkat daerah, sehingga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian kualitatif, dapat disimpulkan bahwa Pengembangan SDM menjadi pilar penting bagi keberlanjutan organisasi, dimana program kaderisasi, sekolah politik, dan pembekalan keterampilan komunikasi politik menjadi sarana untuk mencetak kader yang militan sekaligus kompeten. Membangun kepercayaan publik terhadap partai politik merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan pemenangan pemilu. DPC Partai Gerindra Sidoarjo telah mengupayakan berbagai langkah untuk mempertahankan kepercayaan ini melalui komunikasi yang konsisten, kedekatan dengan masyarakat, dan integritas kader. Strategi pemenangan yang diterapkan cenderung bersifat kampanye *hybrid*, memadukan media sosial dan tatap muka yang disesuaikan dengan segmen pemilih dan kondisi lokal. Kontribusi Partai Gerindra dalam mendukung SDGs ke-16 di Sidoarjo tidak hanya bersifat normatif, tetapi diwujudkan dalam bentuk program konkret yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Upaya ini mencerminkan adanya integrasi nilai inklusivitas, penguatan kelembagaan, serta keadilan sosial melalui pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, hingga advokasi hukum.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Pertama, partai perlu meningkatkan program literasi politik, khususnya yang menasar generasi muda, untuk mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan membentuk kesadaran kritis terhadap isu-isu publik. Kedua, penguatan digital political branding menjadi prioritas, dengan membangun narasi digital yang konsisten di seluruh platform media sosial melalui konten edukatif, dokumentasi kegiatan sosial, dan klarifikasi isu-isu strategis. Ketiga, pelatihan kader berbasis local wisdom perlu digalakkan agar kader dapat lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat Sidoarjo yang memiliki karakteristik sosial dan budaya tertentu. Keempat, evaluasi berkala terhadap program yang selaras dengan SDGs ke-16 harus dilakukan untuk mengukur efektivitasnya dan menyusun strategi perbaikan yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini menyatakan ucapan terima kasih kepada pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, misalnya laboratorium tempat penelitian. Peran donor atau yang mendukung penelitian disebutkan perannya secara ringkas. **Dosen yang menjadi penulis tidak perlu dicantumkan di sini.**

REFERENSI

- [1] “Goal 16: Peace, justice and strong institutions | United Nations Development Programme.” Accessed: Jul. 30, 2025. [Online]. Available: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals/peace-justice-and-strong-institutions>
- [2] S. Daim, Pribadiyono, and Khuzaini, “Patterns of Recruitment and Cadderization of Human Resources and Strategies for Organizational Development of Political Parties in East Java,” *Article in Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 3, no. 5, pp. 117–122, 2024, [Online]. Available: <https://journal.academicjournal.id/index.php/mjssh>
- [3] Amrizal Zulkarnain, “Kronologi Subandi Tolak Rekom PKB hingga Maju di Pilkada Sidoarjo dengan Dukungan Partai Lain,” *Suara Indonesia*, Sidoarjo, 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://suaraindonesia.co.id/news/politik/66d58566b80d3/kronologi-subandi-tolak-rekom-pkb-hingga-maju-di-pilkada-sidoarjo-dengan-dukungan-partai-lain>
- [4] Udin Syah, “Ini Daftar 50 Caleg yang Sukses Rebut Kursi DPRD Sidoarjo Periode 2024-2029,” *Gelora Jatim*, 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://gelorajاتم.com/ini-daftar-50-caleg-yang-sukses-rebut-kursi-dprd-sidoarjo-2024-2029/>
- [5] Ipung, “Partai Gerindra Raih 9 Kursi DPRD Sidoarjo, Kayan: Berkat Elektoral Prabowo-Gibran,” *Sidoarjo News*, 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://sidoarjonews.id/partai-gerindra-raih-9-kursi-dprd-sidoarjo-kayan-berkat-elektoral-prabowo-gibran/>
- [6] S. N. Afhiani, E. Elyta, dan E. Apriyani, “Strategi Pendidikan Politik Pemilih Pemula (Generasi Z) Menjelang Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Kubu Raya,” *Sosio Edukasi Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan*, vol. 7, no. 2, hlm. 75–89, Jun 2024, doi: 10.29408/sosedu.v7i2.24031.
- [7] S. A. Abadi, “Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 4, no. 2, hlm. 328–340, Jan 2020, doi: 10.17977/um019v4i2p328-340.
- [8] Dewi Iriani, D., Fauzan, M. F. M., Budiono, A. B. A., Djabid, F. D. F., dan Arsad, J. H. A. J. H, “Peran Dan Langkah Strategi Partai Politik Dalam Mengikuti Pemilihan Umum 2024,” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 22, hlm. 1–13, 2024.
- [9] J. Firmansyah, A. Apriansyah, dan N. T. Leriska, “Komunikasi Politik Dan Citra Partai (Studi Pada Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Sumbawa),” *Jurnal Trias Politika*, vol. 7, no. 1, hlm. 61–75, Apr 2023, doi: 10.33373/jtp.v7i1.5050.
- [10] A. Giawa dan T. D. Rini, “Proses Rekrutmen Sumber Daya Manusia Partai Politik Pada Pileg 2014 (Studi Kasus Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Dpw Partai Nasdem Diy),” *JBTI : Jurnal Bisnis Teori dan Implementasi*, vol. 8, no. 2, hlm. 161–168, 2017, doi: 10.18196/bti.82090.
- [11] W. Gusmansyah, “Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Dan Hukum Islam,” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, vol. 4, no. 2, hlm. 177–191, Des 2019, doi: 10.29300/imr.v4i2.2831.
- [12] A. Haris, A. Anas, M. Nurjaya, H. Iriawan, dan M. T. Abdullah, “Strategi dan Implementasi Kebijakan Program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa,” *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, hlm. 65–78, Jun 2024, doi: 10.31947/jakpp.v10i1.32690.
- [13] J. B. Sanjaya, M. R. S. Pratama, D. Amaliana, N. F. Dahlya, dan M. N. P. Wulandari, “Optimalisasi SDGs Dalam Program RTLH Sebagai Upaya Akselerasi Rehabilitasi Sosial Masyarakat,” *Jurnal Bina Desa*, vol. 5, no. 1, hlm. 15–21, Feb 2023, doi: 10.15294/jbd.v5i1.40920.
- [14] E. N. Udemba, “Cushioning environmental damage with institutions and FDI: study of sustainable development goals (SDGs),” *Environment, Development and Sustainability*, vol. 25, no. 9, hlm. 10217–10237, Jun 2022, doi: 10.1007/s10668-022-02484-3.
- [15] Situmorang, M, Silviani, I., dan Ginting, E. A, “Strategi Komunikasi Partai Politik Pdp Sumut Dalam Membangun Kepercayaan Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024.,” *Jurnal Social Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, vol. 7, no. 2, hlm. 134–145, 2023, doi: <http://dx.doi.org/10.46930/socialopinion.v7i2.3935>.
- [16] Majid, N., “Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum Di Era Digital,” *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, vol. 1, no. 2, hlm. 53–61, 2023.
- [17] M. Alfarizi dan R. Arifian, “G20 Health Vision in Achieving SDGs 2030: Arranging the Global Health Management Architecture,” *Insights in Public Health Journal*, vol. 3, no. 1, Jul 2022, doi: 10.20884/1.iphj.2022.3.1.5565.

- [18] V. A. Haq, "Peran Kader Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Optimalisasi Partisipasi Politik Perempuan Melalui Program Pemberdayaan di Kota Depok Pasca Pemilu 2019," *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, vol. 5, no. 1, hlm. 28–45, Feb 2024, doi: 10.33822/jpds.v5i1.7725.
- [19] C. Ji, J. Jiang, and Y. Zhang, "Political trust and government performance in the time of COVID-19," *World Dev*, vol. 176, p. 106499, Apr. 2024, doi: 10.1016/J.WORLDDEV.2023.106499.
- [20] D. Devine and V. O. Valgarðsson, "Stability and change in political trust: Evidence and implications from six panel studies," *Eur J Polit Res*, vol. 63, no. 2, pp. 478–497, May 2024, doi: 10.1111/1475-6765.12606.
- [21] M. Hirsch, A. Binder, and J. Matthes, "The Influence of Political Fit, Issue Fit, and Targeted Political Advertising Disclosures on Persuasion Knowledge, Party Evaluation, and Chilling Effects," *Soc Sci Comput Rev*, vol. 42, no. 2, pp. 554–573, Apr. 2024, doi: 10.1177/08944393231193731/FORMAT/EPUB.
- [22] G. Dessler, *Human Resource Management*, 16th ed. Pearson, 2020.
- [23] J. Barney, M. Wright, and D. J. Ketchen, "The resource-based view of the firm: Ten years after 1991," *J Manage*, vol. 27, pp. 625–641, 2001.
- [24] S. Hermawan, W. Hariyanto, and S. Biduri, "Intellectual Capital, Business Performance, and Competitive Advantage: An Empirical Study for the Pharmaceutical Companies," *Journal of Management Systems, 6 issues per year*, vol. 21, no. 175, pp. 103–106, 2020, [Online]. Available: www.calitatea.srac.ro
- [25] F. Biermann, T. Hickmann, C.-A. S nit, and L. Grob, "The Sustainable Development Goals as a Transformative Force?," *The Political Impact of the Sustainable Development Goals*, pp. 204–226, Jul. 2022, doi: 10.1017/9781009082945.009
- [26] M. R. Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika*, vol. 21, no. 1, hlm. 33–54, Apr 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- [27] R. Al Izzati, T. Dartanto, D. Suryadarma, and A. Suryahadi, "Direct elections and trust in state and political institutions: Evidence from Indonesia's election reform," *Eur J Polit Econ*, vol. 85, Dec. 2024, doi: 10.1016/j.ejpoleco.2024.102572.
- [28] N. E. T. I. Santosa, A. Z. DH, and I. G. Said, "The Political Precedence of Wong Cilik's Collective Historical Memory over the 2024 Election," *An-Nur International Journal of Islamic Thought*, vol. 3, no. 1, pp. 19–38, Jun. 2025, doi: 10.62032/AIJIT.V3I1.70.
- [29] N. K. Astanujati and G. A. Trinanda, "Challenges on Party Institutionalization: The Broken Linkage of Three Faces of Party in the National Democrats on Promoting Renewable Energy Bill," *PCD Journal*, vol. 11, no. 1, pp. 35–68, Jan. 2024, doi: 10.22146/pcd.v11i1.9571.
- [30] M. J rlstr m, E. Saru, M. Viitasaari, and K. Akrivou, "Integrating 'common good' authenticity for sustainable human resource management reporting," *German Journal of Human Resource Management*, vol. 38, no. 2, pp. 159–182, May 2024, doi: 10.1177/23970022241229035/FORMAT/EPUB.
- [31] H. Decker, "The role of content personalisation in political social media campaigning: a review of political microtargeting," *Zeitschrift f r Politikwissenschaft*, vol. 35, no. 1, pp. 83–98, Mar. 2025, doi: 10.1007/s41358-025-00410-3.
- [32] A. Rahmadiany and M. P. Aji, "Analysis of Political Branding of The Gerindra Party Through Tiktok Social Media Towards Generation Z In Jakarta: Case Study of The 2024 Election Campaign," *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, vol. 08, no. 3, pp. 843–851, 2024, doi: 10.33751/jhss.v8i3.11100.
- [33] H. Kristiyanto, S. Arinanto, and H. S. Ghafur, "Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy," *Heliyon*, vol. 9, no. 12, Dec. 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e22919.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.